



**PEMERINTAH
KOTA BATAM**

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026 DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Lokasi

📍 Jalan Ir. Sutami Nomor 1, Sekupang,
Kota Batam

Hubungi Kami

☎ 0811-777-6507

📍 dlh.batam.go.id

📧 kotabatam.dlh@gmail.com



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 372 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1722);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;

b. landasan...

- b. landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 Agustus 2026

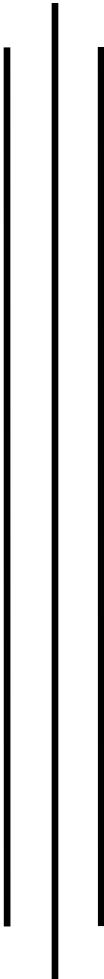
WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN XXII : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 372 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun Anggaran 2026 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025 – 2029.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program, dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2026, semoga Perubahan Rencana Kerja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, 18 Agustus 2026
Kepala Dinas Lingkungan
Hidup
Kota Batam,



Donar M. Hasibuan, S.T.,M.T
Pembina Tingkat I IVb
NIP 197611162002121006

DAFTAR ISI

DAFTAR ISIii

DAFTAR TABEL.....iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum2

1.3 Maksud dan Tujuan3

1.4 Sistematika Penulisan3

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 20264

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
sampai dengan Triwulan II 20264

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan4

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan6

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan7

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan
Hidup 19

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD20

BAB IV PENUTUP.....36

4.1 Catatan Penting.....36

4.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan37

4.3 Rencana Tindak Lanjut.....37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2026 dan Pencapaian Sampai Dengan Triwulan II 20268

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota
Batam 18

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target, dan Pagu pada
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 202622

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Perubahan RKPD.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan Renja Perangkat Daerah mencakup :

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2026, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan Hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 63 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
10. Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025 – 2029 sesuai tugas dan fungsinya.

Tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 yaitu :

1. Penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2026 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2026;

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2026

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Sampai dengan Triwulan II 2026
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja
- 4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sampai dengan Triwulan II 2026

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- ❖ Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R
- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- ❖ Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
- ❖ Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup
 - Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab / Kota

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
- ❖ Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan (PPLH)
 - Kegiatan Pembinaan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemda Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
- ❖ Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
- ❖ Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Tingkat Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
- ❖ Program Pengelolaan persampahan
 - Pengelolaan Sampah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

UPTD TPA TELAGA PUNGGUR

❖ Program Pengelolaan Persampahan

➤ Kegiatan Pengelolaan Sampah

- Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan Sampah

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

➤ Administrasi Keuangan

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

➤ Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

➤ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

➤ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

❖ Program Pengelolaan persampahan

➤ Pengelolaan Sampah

- Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan Sampah
- Penanganan Sampah melalui Pengangkutan
- Pengurangan Sampah melalui Pembatasan Timbunan Sampah
- Pengurangan Sampah melalui Pendaauran Ulang Sampah

❖ Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan

Lingkungan Hidup

➤ Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

➤ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

➤ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

- Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Logistik Kantor
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

UPTD TPA TELAGA PUNGGUR

- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- ❖ Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN : Tidak ada

UPTD TPA TELAGA PUNGGUR : Tidak ada

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan pencapaian sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Pencapaian Sampai Dengan Triwulan II 2026

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6 = 5/4*100
DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Fasilitas Pengelolaan Sampah yang terbangun	37,50%	25%	66,67%
1	3	4	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas TPS 3R/TPST yang telah terbangun	6 Unit	4 Unit	66,67%
1	3	4	2.01	17	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	72 Ton/Hari	0	0
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP PD	74%	0	0
						Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	92,90%	0	0
2	11	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	0	0
2	11	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0	0
2	11	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	100%	100%
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117 Orang	108 Orang	92,31%

PERUBAHAN RENCANA KERJA TA.2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6 = 5/4*100
2	11	1	2.02	3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	11	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	0	0
2	11	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	0	0
2	11	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	25%	25%
2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0	0
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0	0
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6 Laporan	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6 = 5/4*100
2	11	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	0	0
2	11	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	87 Unit	0	0
2	11	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Unit	0	0
2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	50%	50%
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%
2	11	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	33,33%	33,33%
2	11	1	2.09	2	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit	100%
2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	0	0
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6 = 5/4*100
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	100%	0	0
2	11	2	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen kajian lingkungan	100%	0	0
2	11	2	2.01	3	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen	0	0
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Nilai Antara Mutu Air	3,1 Indeks	0	0
						Nilai Antara Kualitas Udara	0,38 Indeks	0	0
						Kualitas Tutupan Lahan	0,400 Indeks	0	0
2	11	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	20%	20%
2	11	3	2.01	7	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	14 Lokasi	3 Lokasi	21,43%
2	11	3	2.01	8	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	3 Laporan	0	0
2	11	3	2.01	11	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6 = 5/4*100
2	11	3	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	50,00%	50%
2	11	3	2.02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	6 Titik	3 Titik	50%
2	11	3	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	100%
2	11	3	2.03	11	Pelaksanaan Pembersihan kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1000 M2	22000 M2	2200%
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase persetujuan lingkungan yang dibina dan diawasi	90%	0	0
2	11	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	90%	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6 = 5/4*100
2	11	6	2.01	7	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang	0	0
2	11	6	2.01	9	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	320 Badan Usaha	0	0
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan masyarakat yang Dibina dalam Pemahaman Lingkungan Hidup	2%	0	0
2	11	8	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan edukasi lingkungan hidup kepada masyarakat	3 Jumlah	0	0
2	11	8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dokumen	0	0
2	11	8	2.01	3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	450 Orang	230 Orang	51,11%
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan dan sengketa bidang Lingkungan Hidup yang diselesaikan	90%	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6 = 5/4*100
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengananan pengaduan dan sengketa bidang Lingkungan Hidup yang diselesaikan	90%	0	0
2	11	10	2.01	4	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	45 Pengaduan	0	0
2	11	10	2.01	6	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	2 Perkara	0	0
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	30%	0	0
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang dikurangi	78.695 Ton	0	0
						Jumlah sampah yang tertangani	464.808 Ton	0	0
2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	212 Unit	3 Unit	1,46%
2	11	11	2.01	9	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	158 Unit	71 Unit	44,94%
2	11	11	2.01	12	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	464.808 Ton	196.967,50 Ton	42,38
2	11	11	2.01	18	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan	6 Laporan	600%
2	11	11	2.01	19	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	2600 Ton	481 Ton	18,51%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6 = 5/4*100
UPTD LABORATORIUM									
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP PD	74%	0	0
						Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	92,90%	0	0
2	11	1	2.05		Administrasi Kepengawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	100%	100%
2	11	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	100%
2	11	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	50%	50%
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
2	11	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	0
2	11	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	100%	100%
2	11	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
2	11	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	100%
2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	50%	50%
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	6 Laporan	600%
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6 = 5/4*100
2	11	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
2	11	1	2.09	2	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	100%
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Nilai Antara Mutu Air	3,1 Indeks	0	0
						Nilai Antara Kualitas Udara	0,38 Indeks	0	0
						Kualitas Tutupan Lahan	0,400 Indeks	0	0
2	11	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	0	0
2	11	3	2.01	9	Pengeoperasian dan Pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	13 Unit	6 Unit	46,15%
2	11	3	2.01	15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	11 Laporan	0	0
UPTD TPA TELAGA PUNGGUR									
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP PD	74%	0	0
						Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	92,90%	0	0
2	11	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase adminstrasi umum terlaksana	100%	100%	100%
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6 = 5/4*100
2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia	100%	50%	50%
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	30%	0	0
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang dikurangi	78.695 Ton	0	0
						Jumlah sampah yang tertangani	464.808 Ton	0	0
2	11	11	2.01	9	Pengeoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan Sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	7 Unit	0	0

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025-2029		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 TW II		Keterangan
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	68,94	Indeks	NA	Realisasi di Akhir Tahun atau TW 4
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	55,50	Indeks	NA	Realisasi di Akhir Tahun atau TW 4
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	84,50	Indeks	NA	Realisasi di Akhir Tahun atau TW 4
4	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	63,24	Indeks	NA	Realisasi di Akhir Tahun atau TW 4
5	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Persentase	60,00	Persentase	NA	Realisasi di Akhir Tahun atau TW 4
6	Persentase Pengelolaan Sampah perkotaan	Persentase	78	Persentase	NA	Realisasi di Akhir Tahun atau TW 4
7	Indeks Kepuasan Masyarakat di DLH	Persentase	91,13	Persentase	NA	Realisasi di Akhir Tahun atau TW 4

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, seperti pada kebutuhan pembangunan lingkungan hidup serta tuntutan implementasi pembangunan berkelanjutan/sustainable development.

Kerusakan lingkungan hidup secara global telah berdampak pada perubahan iklim yang menuai berbagai bencana yang mengancam keberlangsungan hidup manusia di masa mendatang, isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, maka isu-isu strategis yang menjadi rumusan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, yaitu:

1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Air Baku, yang berkaitan dengan ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta kualitas air yang dipengaruhi oleh aktivitas domestic, industry dan perubahan tata guna lahan.
2. Pengelolaan Sampah Perkotaan dan Limbah Industri, yang berkaitan dengan meningkatnya timbunan sampah domestik serta limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi mempengaruhi daya dukung lingkungan
3. Perubahan Tata Guna Lahan, yang disebabkan oleh pesatnya pembangunan Kawasan industry, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi mempengaruhi daya dukung lingkungan.
4. Kerusakan Ekosistem, yang meliputi degradasi ekosistem mangrove, lamun, dan Kawasan pesisir akibat pembangunan, reklamasi, serta tekanan pemanfaatan wilayah pesisir.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam pada Tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026.

Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut;

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, adanya Pengurangan karena disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi kebutuhan gaji dan TPP ASN
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, adanya penambahan untuk mengakomodir kekurangan perjalanan dinas yang ada di Dinas Lingkungan Hidup
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, adanya pengurangan dikarenakan efisiensi kertas dan cetak map dinas
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, adanya pengurangan dikarenakan efisiensi listrik dan air
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas, adanya penambahan Rekondisi untuk mobil operasional
2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1) Sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup, adanya penambahan honorarium penilai sekolah adiwiyata
3. Program Pengelolaan Persampahan
 - a. Kegiatan Pengelolaan Persampahan
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, adanya pengurangan beberapa armada persampahan

- 2) Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah, adanya penambahan pemeliharaan armada persampahan dan BBM
- 3) Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui pengangkutan, adanya penambahan untuk swastanisasi
- 4) Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah, adanya pengurangan di jumlah satgas
- 5) Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah, adanya pengurangan bbm

UPT TPA TELAGA PUNGGUR

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, adanya penambahan untuk Continuous Form buat timbangan TPA
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, adanya penambahan dikarenakan penyesuaian BPJS Kesehatan satgas
2. Program Pengelolaan Persampahan
 - a. Kegiatan Pengelolaan Sampah
 - 1) Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah, adanya penambahan untuk pemeliharaan alat berat

Adapun Program dan Kegiatan sebelum perubahan dan sesudah perubahan dapat dilihat pada tabel 3.1 lampiran dibawah ini

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BATAM TAHUN 2026																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP								222.131.434.336,00	201.571.094.635,00	217.439.337.012,00	-4.692.097.324,00						243.119.368.519,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							219.491.440.336,20	198.914.714.635,00	214.782.957.012,00	-4.708.483.324,20							240.197.350.519,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							219.491.440.336,20	198.914.714.635,00	214.782.957.012,00	-4.708.483.324,20							240.197.350.519,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				73.71 92.9 Nilai Nilai	100 %	26.124.841.575,90	27.249.542.391,00	25.488.937.230,00	2.372.258.820,10							28.497.100.396,00	
		-	-	-	-	-	-	-	26.124.841.575,90	27.249.542.391,00	25.488.937.230,00	-	-	-	-	-	-	-	28.497.100.396,00	-
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya				100 %	100 %	294.341.000,00	294.509.000,00	294.509.000,00	168.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemerenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemerenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan Kota Batam		323.959.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	194.341.000,00	194.509.000,00	194.509.000,00	168.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemerenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemerenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			213.959.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase adminstrasi umum terlaksana				100 %	100 %	801.041.400,00	674.351.600,00	750.703.600,00	-50.337.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemerenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemerenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	-		893.691.040,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.562.000,00	19.562.000,00	19.562.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemerenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemerenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			21.518.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.688.000,00	15.192.000,00	15.192.000,00	504.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemerenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemerenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			16.711.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan				100 %	100 %	615.406.600,00	847.608.300,00	847.608.300,00	232.201.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan Kota Batam		720.980.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	23 Unit	42.018.000,00	42.018.000,00	42.018.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			46.219.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	80.062.000,00	64.555.500,00	64.555.500,00	-15.506.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			71.011.050,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan				100 %	100 %	4.521.689.724,00	4.708.887.324,00	4.588.769.724,00	67.080.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan Kota Batam		5.179.776.056,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	94.164.800,00	94.164.800,00	94.164.800,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			103.581.280,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	95.760.000,00	95.760.000,00	95.760.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			105.336.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik				100 %	100 %	1.064.827.800,00	1.105.267.800,00	1.179.376.800,00	114.549.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan Kota Batam		1.269.156.580,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	55.690.000,00	59.330.000,00	59.330.000,00	3.640.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			65.263.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air (IKA); Indeks kualitas udara (IKU); Indeks Tutupan Hutan (ITH)				0.38 0.4 3.1 Indeks Indeks	55,19; 90,93; 70,42 Indeks	982.813.475,00	803.360.100,00	803.360.100,00	-14.087.025,00							968.726.450,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup				100 %	100 %	839.052.275,00	659.148.900,00	659.148.900,00	-179.903.375,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup		810.083.670,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota																		
			Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan				13 Unit	6 Unit	74.195.175,00	14.385.600,00	14.385.600,00	-59.809.575,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			36.581.160,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				11 Dokumen	11 Dokumen	170.650.000,00	220.569.000,00	220.569.000,00	49.919.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			242.625.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD TPA TELAGA PUNGUR							222.131.434.336,00	201.571.094.635,00	217.439.337.012,00	-4.692.097.324,00						243.119.368.519,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							219.491.440.336,20	198.914.714.635,00	214.782.957.012,00	-4.708.483.324,20							240.197.350.519,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							219.491.440.336,20	198.914.714.635,00	214.782.957.012,00	-4.708.483.324,20							240.197.350.519,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD				73.71 92.9 Nilai Nilai	73.71 92.9 Nilai Nilai	26.124.841.575,90	27.249.542.391,00	25.488.937.230,00	2.372.258.820,10							28.497.100.396,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran				100 %	100 %	801.041.400,00	674.351.600,00	750.703.600,00	-50.337.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan Kota Batam		893.691.040,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49.680.000,00	49.680.000,00	74.520.000,00	24.840.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			54.648.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan				100 %	100 %	4.521.689.724,00	4.708.887.324,00	4.588.769.724,00	67.080.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan Kota Batam		5.179.776.056,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.597.314.524,00	3.597.314.524,00	3.612.494.524,00	15.180.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			3.957.045.976,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah				30 %	30 %	191.192.367.985,30	169.782.356.144,00	187.341.403.682,00	18.218.796.317,70							209.411.164.303,00		
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang dikurangi Jumlah sampah yang tertangani				464808 ton 78695 ton	464808 ton 78695 ton	191.192.367.985,30	169.782.356.144,00	187.341.403.682,00	-3.850.964.303,30			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam		209.411.164.303,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah																			
			Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				7 Unit	8 Unit	7.490.718.000,00	7.490.718.000,00	11.051.809.000,00	3.561.091.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			8.239.789.880,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							222.131.434.336,00	201.571.094.635,00	217.439.337.012,00	-4.692.097.324,00					243.119.368.519,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.639.993.999,80	2.656.380.000,00	2.656.380.000,00	16.386.000,20							2.922.018.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							2.639.993.999,80	2.656.380.000,00	2.656.380.000,00	16.386.000,20							2.922.018.000,00	
1.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Fasilitas Pengelolaan Sampah yang terbangun				37.5 %	37.5 %	2.639.993.999,80	2.656.380.000,00	2.656.380.000,00	282.024.000,20							2.922.018.000,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas TPS 3R/TPST yang telah terbangun				6 unit	6 unit	2.639.993.999,80	2.656.380.000,00	2.656.380.000,00	16.386.000,20			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemeruhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam		2.922.018.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun				470692 Ton/hari	72 Ton/hari	2.639.993.999,80	2.656.380.000,00	2.656.380.000,00	16.386.000,20	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemeruhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			2.922.018.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							219.491.440.336,20	198.914.714.635,00	214.782.957.012,00	-4.708.483.324,20							240.197.350.519,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							219.491.440.336,20	198.914.714.635,00	214.782.957.012,00	-4.708.483.324,20							240.197.350.519,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD				73.71 92.9 Nilai Nilai	73.71 92.9 Nilai Nilai	26.124.841.575,90	27.249.542.391,00	25.488.937.230,00	2.372.258.820,10							28.497.100.396,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu				100 %	100 %	19.552.800,00	11.700.000,00	11.700.000,00	-7.852.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemeruhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan Kota Batam		16.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.917.600,00	0,00	0,00	-4.917.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemeruhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.917.600,00	0,00	0,00	-4.917.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.917.600,00	0,00	0,00	-4.917.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	2 Laporan	4.800.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	6.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			16.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terlaksana				100 %	100 %	18.807.982.251,90	19.607.218.367,00	17.816.269.806,00	-991.712.445,90			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan Kota Batam		20.093.035.970,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				117 Orang/ bulan	108 Orang/ bulan	18.686.242.251,90	19.477.018.367,00	17.686.069.806,00	-1.000.172.445,90	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			19.949.815.970,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	121.740.000,00	130.200.000,00	130.200.000,00	8.460.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			143.220.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya				100 %	100 %	294.341.000,00	294.509.000,00	294.509.000,00	168.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan Kota Batam		323.959.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase adminstrasi umum terlaksana				100 %	100 %	801.041.400,00	674.351.600,00	750.703.600,00	-50.337.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan Kota Batam		893.691.040,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	29.685.400,00	32.607.400,00	32.607.400,00	2.922.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			35.868.140,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	129.990.400,00	124.616.600,00	124.616.600,00	-5.373.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			152.150.240,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	114.987.600,00	114.987.600,00	57.597.600,00	-57.390.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			126.486.360,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	442.448.000,00	317.706.000,00	426.608.000,00	-15.840.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan		486.308.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan				100 %	100 %	615.406.600,00	847.608.300,00	847.608.300,00	232.201.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan Kota Batam	720.980.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				70 Unit	88 Unit	123.978.300,00	165.686.400,00	165.686.400,00	41.708.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan		131.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				29 Unit	61 Unit	369.348.300,00	575.348.400,00	575.348.400,00	206.000.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan		472.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan				100 %	100 %	4.521.689.724,00	4.708.887.324,00	4.588.769.724,00	67.080.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan Kota Batam	5.179.776.056,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	442.279.200,00	629.476.800,00	494.179.200,00	51.900.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan		692.424.480,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	292.171.200,00	292.171.200,00	292.171.200,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemerluhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemerluhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan		321.388.320,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik</i>				100 %	100 %	1.064.827.800,00	1.105.267.800,00	1.179.376.800,00	114.549.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemerluhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemerluhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan Kota Batam	1.269.156.580,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				34 Unit	34 Unit	804.970.000,00	890.290.000,00	964.399.000,00	159.429.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemerluhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemerluhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan		979.309.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				100 Unit	91 Unit	110.430.000,00	61.910.000,00	61.910.000,00	-48.520.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemerluhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemerluhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan		121.473.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	93.737.800,00	93.737.800,00	93.737.800,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemerluhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemerluhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan		103.111.580,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan				40 %	100 %	213.776.000,00	215.199.000,00	215.199.000,00	22.942.900,00							236.718.900,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	<i>Persentase ketersediaan dokumen RPPLH Kabupaten/Kota</i>				40 %	100 %	213.776.000,00	215.199.000,00	215.199.000,00	1.423.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemerluhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemerluhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup	236.718.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	213.776.000,00	215.199.000,00	215.199.000,00	1.423.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			236.718.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Nilai Antara Kualitas Udara Kualitas Tutupan Lahan Nilai Antara Mutu Air				0.38 0.4 3.1 Indeks Indeks Indeks	0.38 0.4 3.1 Indeks Indeks Indeks	982.813.475,00	803.360.100,00	803.360.100,00	-14.087.025,00							968.726.450,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup				100 %	100 %	839.052.275,00	659.148.900,00	659.148.900,00	-179.903.375,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup		810.083.670,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				14 Lokasi	12 Lokasi	324.080.900,00	152.727.600,00	152.727.600,00	-171.353.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			232.889.360,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan																		
			Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim				3 Laporan	3 Laporan	199.999.600,00	196.609.100,00	196.609.100,00	-3.390.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			219.999.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																		
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	70.126.600,00	74.857.600,00	74.857.600,00	4.731.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			77.987.360,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup				100 %	100 %	29.895.400,00	29.895.400,00	29.895.400,00	0,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup		32.895.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan</i>				6 Titik	6 Titik	29.895.400,00	29.895.400,00	29.895.400,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			32.895.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>				100 %	100 %	113.865.800,00	114.315.800,00	114.315.800,00	450.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup		125.747.380,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0011	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			<i>luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota</i>				1000 M2	24200 M2	113.865.800,00	114.315.800,00	114.315.800,00	450.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			125.747.380,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	<i>Persentase persetujuan lingkungan yang dibina dan diawasi</i>				90 %	90 %	363.074.200,00	288.470.200,00	288.470.200,00	37.495.420,00							400.569.620,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan</i>				90 %	90 %	363.074.200,00	288.470.200,00	288.470.200,00	-74.604.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup		400.569.620,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			<i>Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				10 Orang	4 Orang	140.478.200,00	127.420.200,00	127.420.200,00	-13.058.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			154.526.020,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			<i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi</i>				320 Badan Usaha	320 Badan Usaha	222.596.000,00	161.050.000,00	161.050.000,00	-61.546.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			246.043.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan masyarakat yang Dibina dalam Pemahaman Lingkungan Hidup				2 %	2 %	394.159.000,00	354.358.700,00	424.158.700,00	45.340.940,00							439.499.940,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan edukasi lingkungan hidup kepada masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	394.159.000,00	354.358.700,00	424.158.700,00	29.999.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemerenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemerenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup		439.499.940,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				7 Dokumen	1 Dokumen	195.063.600,00	196.410.600,00	266.210.600,00	71.147.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemerenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemerenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				450 Orang	450 Orang	199.095.400,00	157.948.100,00	157.948.100,00	-41.147.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemerenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemerenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			219.499.940,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa				90 %	90 %	220.408.100,00	221.428.100,00	221.428.100,00	23.162.810,00							243.570.910,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yang terselesaikan				90 %	90 %	220.408.100,00	221.428.100,00	221.428.100,00	1.020.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemerenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemerenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup		243.570.910,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola				45 Pengaduan	45 Pengaduan	148.710.000,00	149.610.000,00	149.610.000,00	900.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemerenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemerenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			164.571.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota				2 Sanksi	2 Sanksi	71.698.100,00	71.818.100,00	71.818.100,00	120.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			78.999.910,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah				30 %	30 %	191.192.367.985,30	169.782.356.144,00	187.341.403.682,00	18.218.796.317,70							209.411.164.303,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang dikurangi Jumlah sampah yang tertangani				464808 ton 78695 ton	464808 ton 78695 ton	191.192.367.985,30	169.782.356.144,00	187.341.403.682,00	-3.850.964.303,30			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	-		209.411.164.303,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				414 Unit	181 Unit	89.009.919.977,30	64.840.088.852,00	63.102.403.502,00	-25.907.516.475,30	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			93.620.510.255,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah																		
			Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				158 Unit	425 Unit	19.383.483.500,00	23.463.546.472,00	29.337.057.500,00	9.953.574.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			26.602.803.040,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				464808 Ton	464808 Ton	73.474.120.348,00	68.700.110.080,00	78.641.400.460,00	5.167.280.112,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			78.882.333.552,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah																		
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				1 Laporan	12 Laporan	1.241.220.120,00	4.692.957.200,00	4.625.962.680,00	3.384.742.560,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			1.411.298.482,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				2600 Ton	1200 Ton	592.906.040,00	594.935.540,00	582.770.540,00	-10.135.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			654.429.094,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	J U M L A H								222.131.434.336,00	201.571.094.635,00	217.439.337.012,00	-341.980.602.807,02							243.119.368.519,00	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam 2025 - 2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2026.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, diantaranya yaitu :

1. Penanganan dan Pengelolaan Sampah Laut. Penanganan sampah dan pengelolaan sampah laut yang belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
 - a. Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah dan dampak buruk sampah laut terhadap ekosistem, yang menyebabkan perilaku pembuangan sampah sembarangan masih sering terjadi.
 - b. Belum memadainya infrastruktur pengelolaan limbah yang memadai, sehingga sistem pengumpulan, pengolahan dan daur ulang sampah di wilayah pesisir dan laut masih terbatas.
 - c. Masih tingginya penggunaan plastik sekali pakai yang sulit terurai, sehingga volume sampah plastik di laut terus meningkat.
 - d. Peran serta masyarakat dan dunia usaha yang belum maksimal, serta kurangnya program edukasi dan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat.
2. Rencana Batam bebas sampah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :
 - a. Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, terutama kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum terkait pengelolaan sampah, sehingga masyarakat belum sepenuhnya menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
 - b. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
 - c. Masih adanya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar yang tersebar di berbagai kecamatan, yang menunjukkan kurangnya kesadaran dan pengawasan dalam pembuangan sampah.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, baik sampah di darat maupun di laut di sebabkan oleh faktor-faktor berikut :
 - a. Kurangnya kesadaran lingkungan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah secara benar dan dampak negatif dari pencemaran sampah terhadap kesehatan dan lingkungan.
 - b. Masih terbatasnya fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

- c. Belum adanya regulasi atau sanksi yang tegas bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan, sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku pembuangan sampah ilegal.
- d. Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berbayar dan Sedotan Plastik
- e. Penggunaan Kantong Ramah Lingkungan

4.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam tahun 2025-2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2026, maka disampaikan Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun Anggaran 2026;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Adapun rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan Batam Bebas yang belum berjalan maksimal pada tahun 2026, meliputi beberapa langkah strategis, yaitu:

1. Penambahan armada armada pengangkutan sampah
2. Peningkatan program edukasi dan sosialisasi perihal pelestarian lingkungan hidup kepada masyarakat

3. Pembentukan dan pengembangan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di sejumlah titik strategis untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah dan mengurangi pembuangan sampah liar

Selanjutnya rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, baik sampah di darat maupun di laut di Kota Batam meliputi beberapa langkah strategis yaitu:

1. Pelatihan dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat dan pengelolaan tempat umum
2. Pemberdayaan komunitas tingkat RT/RW melalui sosialisasi pengelolaan sampah mandiri yang melibatkan pelatihan kader lingkungan
3. Pengembangan dan optimalisasi bank sampah sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyetor sampah yang masih bernilai ekonomis

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD